

	Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
--	---

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD					
1.1	Indikator 1.1 Penyelesaian Tahapan Akses Indonesia Ke OECD	Persentase	37,5%	30,75%	12%	39%* 32%**
II	Sasaran Program 2. Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi					
2.1	Indikator 2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun (Rupiah)	2.175.26 Triliun Rupiah	-	498,8 Triliun Rupiah	23%**
2.2	Indikator 2.2 Persentase penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025	Persentase	100%	50%	50%	100%* 50%**
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi					
3.1	Indikator 3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi.	Persentase	85%	12,5%	33,23%	266%* 39%**
3.2	Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)	Persentase	100%	10%	20%	200%* 20%**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
3.3	Indikator 3.3 Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat	Persentase	100%	50%	62,5%	125%* 63%**
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	1 dari 4	100%* 33%**
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100%* 108%**
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Profesional					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persentase	92%	25%	22,92%	92%* 25%**
Note: - *= % capaian triwulan - ** = % capaian tahunan						

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD, di mana proses akses OECD Indonesia dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi Indonesia yang terdiri atas transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola melalui keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Penyelesaian Tahapan Akses Indonesia ke OECD.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Tahapan Akses Indonesia ke OECD	Latar Belakang Untuk melaksanakan proses akses OECD tersebut, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD, dimana keanggotaan Tim Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD yang terbagi menjadi 26 Bidang sesuai dengan Peta Jalan Akses Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi bertugas mengawal dan mengkoordinasikan Penyelesaian Akses Indonesia ke OECD.
---	--

Berdasarkan Peta Jalan Akses OECD Indonesia dan daftar instrumen hukum OECD yang disampaikan Sekretariat OECD, saat ini terdapat 244 instrumen hukum OECD yang menjadi ruang lingkup akses OECD Indonesia. Instrumen tersebut perlu dilakukan penilaian mandiri, penguatan hasil penilaian mandiri dalam dokumen Initial Memorandum, hingga penyempurnaan terhadap standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan Indonesia oleh Pemri sebagaimana masukan dari Komite OECD.

Hasil Pengukuran Kinerja

Penyelesaian akses Indonesia ke dalam OECD dari tahun 2025 hingga 2029, dibagi menjadi 3 proses tahapan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen *Initial Memorandum* kepada Sekretariat OECD. Ditargetkan selesai dalam 1 tahun di tahun 2025. Mencakup 30% dari seluruh tahapan proses akses OECD dengan **bobot 30**.
- 2. Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD. Ditargetkan selesai dalam 3 tahun dari 2026 hingga 2028. Mencakup 30% dari seluruh tahapan proses penyelesaian akses OECD dengan **bobot 25**.
- 3. Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD. Ditargetkan selesai dalam 4 tahun dari 2026 hingga 2029. Mencakup 40% dari seluruh tahapan proses penyelesaian akses OECD dengan **bobot 45**.

Pembobotan indikator persentase capaian akses Indonesia ke OECD disusun berdasarkan pendekatan *results-based management*, dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas, kendali kebijakan, serta kontribusi masing-masing tahapan terhadap outcome akhir akses OECD.

Tahapan	Bobot (%)	Argumentasi Utama
1. Initial Memorandum	30%	Output krusial, <i>high effort, full controllability</i>
2. Reviu Komite OECD	25%	<i>Gatekeeping stage, high uncertainty, partial control</i>
3. Penyempurnaan Regulasi	45%	Outcome substantif, <i>highest complexity & impact</i>

Adapun target dari masing-masing indikator OECD sebagai berikut:

Tahapan	2025	2026	2027	2028	2029
a. Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024–2025)	100%				
b. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2026–2028)	-	30%	60%	100%	
c. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2027–2029)	-	-	50%	75%	100%

Perhitungan Target per Tahun sejak 2025 menjadi:

1. Tahun 2025 sebesar 30% – (100x30%)
2. Tahun 2026 sebesar 37,5% -- (100x30%) + (30x25%) ;
3. Tahun 2027 sebesar 67,5% -- (100x30%) + (60x25%) + (50X45%);
4. Tahun 2028 sebesar 88,75% -- (100x30%) + (100x25%) + (75X45%); dan
5. Tahun 2029 sebesar 100% -- (100x30%) + (100x25%) + (100X45%).

Adapun perhitungan target dilakukan menggunakan formula berikut:

$$\text{Target Tahun berjalan} = \frac{(\sum(\text{bobot} \times \text{target indikator OECD di tahun berjalan}) / 100) \times 100\%}{100\%}$$

$$\text{Capaian tiap tahapan} = \frac{(\text{Realisasi tahapan pada tahun berjalan} / \text{Target tahun berjalan}) \times 100\%}{100\%}$$

$$\text{Capaian Kumulatif (yang dituliskan sebagai Capaian atas IKU)} =$$

$$\text{Akumulasi realisasi tahun sebelumnya} + \frac{\sum ((\text{Capaian tiap tahapan} \times \text{Target tahun berjalan}) / 100)}{100\%}$$

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Tahapan Akses Indonesia ke OECD telah mencapai 12% dari target Tahun 2026 sebesar 30,75% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU- 1.1 Persentase Penyelesaian Tahapan Akses Indonesia ke OECD	Persen	30,75%	12%	39%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi yang telah tercapai per Triwulan I adalah sebagai berikut:

1.1 Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi penyusunan <i>national action plan</i> bidang lingkungan hidup	Terlaksana	- Kementerian Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab bidang, telah menyampaikan kuesioner yang berisi hal-hal teknis yang memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut kepada OECD yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan <i>fact-finding mission</i> oleh OECD pada bidang <i>Environment Policy</i> dan <i>Waste Management</i> <i>National Action Plan</i> yang berisi rencana penyesuaian kebijakan dan regulasi

			berdasarkan masukan dari OECD yang diperoleh dari pengisian kuesioner dan pelaksanaan <i>fact-finding mission</i> telah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan akan disampaikan kepada Environment Policy Committee (EPOC) OECD di Paris pada April 2026
2.	Koordinasi penyiapan jawaban kuesioner bidang Kebijakan Ekonomi Digital	Terlaksana	Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyelesaikan dan menyampaikan seluruh tahapan Kuesioner Committee on Digital Economy Policy (CDEP) kepada Sekretariat OECD pada tanggal 23 Januari 2026 (bagian I) dan 6 Februari 2026 (Bagian 2)
3.	Koordinasi penyiapan jawaban kuesioner bidang Kebijakan Fiskal		OECD telah menyampaikan kuesioner bidang <i>fiscal affairs</i> pada Desember 2025. Selanjutnya Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab bidang, telah menyampaikan tanggapan atas kuesioner tersebut kepada OECD pada 26 Maret 2026
4.	Koordinasi penyiapan jawaban kuesioner bidang Perdagangan dan Kredit Ekspor	Terlaksana	• Sekretariat Tim Nasional OECD telah melakukan pendampingan dalam pengisian kuesioner bidang

			Trade dan Export Credit Kuesioner disampaikan kepada OECD pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kementerian Perdagangan selaku penanggung jawab bidang
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan tanggapan permohonan persetujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergabung menjadi anggota OECD *Champion Mayors for Inclusive Growth Initiative* pada 20 Januari 2026.
2. Menyelenggarakan bimbingan teknis platform INA OECD pada 19-23 Januari 2026.
3. Menyelenggarakan Seminar Nasional Akses OECD Indonesia dan implikasi bagi dunia usaha pada 21 April 2026.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting dengan Sekretariat OECD serta melakukan pertemuan-pertemuan lainnya menggunakan fasilitas ruang rapat kantor

2

Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja (1) Nilai Realisasi PMA dan PMDN dan (2) Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Nilai Realisasi PMA dan PMDN

Latar Belakang

Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.

Dengan target nilai realisasi investasi sebesar Rp1.905,60 Triliun pada tahun 2025, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.

Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.

PMA merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Nilai Realisasi PMA dan PMDN merupakan turunan dari Prioritas Nasional Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diamanatkan kepada Menko Perekonomian sebagai koordinator dalam meningkatkan investasi yang kemudian diturunkan kepada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Leader dari nilai realisasi PMA dan PMDN tetap berada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah melakukan pengawalan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung ketercapaian realisasi Nilai PMA dan PMDN di Bidang Hilirisasi.

Formula pengukuran:

Nilai PMA = Ekuitas Asing + Pinjaman Luar Negeri + Reinvestasi Laba Asing

Nilai PMDN = Ekuitas Domestik + Pinjaman Dalam Negeri + Reinvestasi Laba Domestik

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar Rp2.175,26 Triliun penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Jangka Menengah 2025-2029. Adapun target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.175,26 Triliun.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Nilai Realisasi PMA dan PMDN yang telah terealisasi sebesar Rp 498,8 triliun atau mencapai 22,9% dari target Tahun 2026 sebesar Rp 2.175,26 Triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun (Rupiah)	Rp 2.175,26 Triliun	22,9%	100%

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Investasi/BKPM, capaian realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja positif dengan total realisasi sebesar Rp498,8 Triliun. Angka ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp250 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp248,8 triliun.

Dari sisi wilayah, lima besar lokasi realisasi investasi tercatat berada di:

1. DKI Jakarta sebesar Rp78,7 triliun,
2. Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun,
3. Banten sebesar Rp34,4 triliun,
4. Jawa Timur sebesar Rp32,6 triliun, dan
5. Sulawesi Tengah sebesar Rp32,1 triliun.

Jika dilihat dari subsektor, realisasi investasi Triwulan I 2026 didorong oleh lima subsektor utama, yaitu:

1. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar Rp64,4 triliun,
2. Jasa Lainnya sebesar Rp64,2 triliun,
3. Pertambangan sebesar Rp51,9 triliun,
4. Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar Rp48,0 triliun, dan
5. Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp45,4 triliun.

Sementara itu, dari sisi negara asal investasi asing, realisasi PMA didominasi oleh a) Singapura sebesar US\$ 4,6 miliar; b) Hongkong sebesar US\$ 2,7 miliar; c) RRT (Tiongkok) sebesar US\$ 2,2 miliar; d) Amerika Serikat sebesar US\$ 1,3 miliar; dan e) Jepang sebesar US\$ 1,0 miliar.

Capaian ini memperlihatkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Pemerintah akan terus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri, serta peningkatan promosi investasi di sektor-sektor strategis dan berkelanjutan, sehingga realisasi investasi ke depan dapat semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Tahun 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dalam bentuk penyampaian permohonan data/laporan mengenai realisasi investasi di bidang hilirisasi pada tanggal 19 Januari 2026.
2	Rapat Koordinasi Penyelesaian Hambatan Investasi di Bidang Hilirisasi: Keberlanjutan Investasi Komoditas Perikanan di Danau Toba	Terlaksana	- Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Keberlanjutan Usaha Budi Daya Perikanan di Danau Toba pada 10 Februari 2026. - Audiensi dengan Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) pada tanggal 24 Februari 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah menyusun Ekonomi Indonesia Terkini edisi Maret 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah terdapat irisan tugas dan fungsi antara beberapa unit kerja di internal Kemenko Perekonomian yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi program, serta kurang optimalnya koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini menghambat efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Dilakukan penyesuaian dan penegasan kembali tugas serta fungsi masing-masing unit kerja yang m ruang lingkup tanggung jawab yang jelas, saling melengkapi, serta mendukung koordinasi terpadu dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Dengan demikian, potensi irisan dapat diminimalisir, efektivitas kerja meningkat, dan sinergi antar unit kerja dapat terbangun secara berkesinambungan.

**Persentase
Penyelesaian
Implementasi
Peraturan**

Latar Belakang

Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing

**Pemerintah No. 28
Tahun 2025**

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.

Dengan target nilai realisasi investasi sebesar 2.175,26 Triliun Rupiah pada tahun 2026, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.

Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.

Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 merujuk terhadap penyelesaian sejumlah regulasi turunan sebagai salah satu bentuk nyata dukungan implementasi PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang berhasil diundangkan dan/atau terselesaikan. Regulasi ini mengacu kepada Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa yang terkait dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria dalam menjalankan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi untuk mencapai target ini adalah dengan melakukan koordinasi antar sektor untuk mensinkronkan persyaratan, kewajiban, dan tata cara perizinan yang hasil akhirnya adalah regulasi turunan yang akan menunjang implementasi PP 28 Tahun 2025. Penyelesaian regulasi-regulasi turunan ini akan menjadi panduan detail bagi pelaku usaha dan pemroses perizinan di Pusat dan Daerah dalam menjalankan proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Hasil Pengukuran Kinerja

Formula perhitungan adalah sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan PP 28 Tahun 2025 =

$$\frac{\text{Jumlah regulasi Turunan PP 28/2025 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah regulasi turunan PP 28/2025 yang ditargetkan}} \times 100\%$$

Jumlah regulasi turunan yang ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 4 sektor regulasi terkait dukungan implementasi PP 28 Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Sektor Perhubungan;
2. Sektor Kebudayaan;
3. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
4. Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pada triwulan I Tahun 2026, Persentase penyelesaian regulasi dan instrumen pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 yang emncapai target yang telah terelea

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	Persentase	50%	50%	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses koordinasi untuk formulasi kebijakan pada triwulan I 2026 sudah sesuai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, yang mana telah dilakukan koordinasi penyelesaian regulasi turunan PP No. 28 Tahun 2025 pada sektor perhubungan dan kebudayaan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penghimpunan Usulan Perubahan Bidang Usaha pada Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM) dari Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha	Terlaksana	- Telah disusun matriks progress usulan K/L terkait perubahan pengaturan bidang usaha pada Perpres BUPM - Telah dilaksnakan review usulan K/L terkait perubahan pengaturan bidang usaha pada Perpres BUPM beserta RIA yang telah disampaikan. - Telah dilaksanakan rapat konfirmasi penyesuaian KBLI 2025 pada revisi Perpres BUPM
2	Rapat Koordinasi Penyelesaian Permen dan Perka pelaksana PP No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko untuk sektor kelautan dan perikanan;	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

	sektor energi dan sumber daya mineral; sektor keagamaan; sektor lingkungan hidup, dan subsektor keamanan.		Sektor ESDM pada tanggal 29 Januari 2026 Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Lampiran PP No. 28 Tahun 2025 Sektor Lingkungan Hidup (KBLI 37021 dan 37022) pada tanggal 10 Februari 2026
3	Koordinasi penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor perhubungan dan sektor kebudayaan.	Terlaksana	Telah terbit regulasi sektor perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2026 dan regulasi sektor kebudayaan melalui Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah menyusun Ekonomi Indonesia Terkini edisi Maret 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 28 Tahun 2025 oleh Kementerian/Lembaga masih melampaui target waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya komitmen Kementerian/Lembaga pengampu sektor dalam menyelesaikan keputusan pada tingkat pemimpin tertinggi.

Berdasarkan kendala-kendala dan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, beberapa upaya atau rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah diperlukannya penguatan komitmen Kementerian/lembaga pengampu sektor, percepatan pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan penyelesaian peraturan pelaksanaan sesuai dengan target.

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh indikator kinerja Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

*Tingkat Efektivitas
Kerja Sama
Ekonomi
Internasional
melalui Jumlah
Komitmen, Nilai
Perdagangan dan
Investasi*

Latar Belakang

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama ekonomi yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi internasional termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi internasional dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

Adapun efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini didukung dengan melalui berbagai kerja sama dengan negara mitra Indonesia dan lembaga, koordinasi dengan K/L terkait, dan memanfaatkan hasil dari kesepakatan dan perjanjian. Komitmen kerja sama ekonomi dilakukan melalui kesepakatan pada forum yang diketuai dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun perundingan yang dilakukan dan/atau disepakati oleh K/L lain di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini juga meliputi kesepakatan hasil pembahasan, perundingan, dan secara khusus dapat berupa persetujuan atau perjanjian dalam bentuk FTA/PTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral maupun review dan upgrading perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, dilaksanakan juga tindak lanjut berupa implementasi hasil kesepakatan, perjanjian, dan program atau proyek yang telah disepakati.

IKU ini juga mencerminkan sejauh mana sebuah negara atau organisasi internasional berhasil dalam mencapai tujuan kerjasama ekonomi melalui berbagai kebijakan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Komitmen dalam konteks kerja sama ekonomi internasional dapat melalui bentuk perjanjian, kontrak, atau kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih, serta organisasi internasional. Beberapa kebijakan dan tindak lanjut yang mendukung tercapainya jumlah komitmen antara lain berupa kebijakan diplomasi ekonomi yang proaktif, pembentukan atau pembaruan perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau

perjanjian investasi internasional (IIAs), serta tindak lanjut komitmen realisasi program atau proyek yang telah disepakati.

Formula pengukuran:

Efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:

1. Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Mitra Indonesia (80%)

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi internasional. Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi, diplomasi ekonomi, business matching, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait. Komponen ini dibobotkan sebesar 80% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi merupakan tugas dan fungsi pokok dari Deputi 2.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar 41 Komitmen.

2. Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Prancis, Rusia, Belarus.

Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi sub komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2026 yang memiliki kerja sama ekonomi bilateral dengan Kemenko Perekonomian sebesar USD 161 Miliar. Perhitungan target berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekspor di tahun 2026 dari nilai rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir (2021-2025). Data diolah bersumber dari Kementerian Perdagangan.

3. Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur realisasi nilai investasi tahunan (dalam USD) dari negara mitra utama Indonesia, seperti Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Tiongkok, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, serta kawasan seperti Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia. Realisasi investasi dihitung berdasarkan periode Januari - September tahun berjalan, dengan mempertimbangkan bahwa investasi dapat terealisasi secara bertahap lintas tahun. Komponen ini memiliki bobot 10% karena merupakan hasil kontribusi kolektif berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, asosiasi, dan dunia usaha.

Target nilai investasi dengan negara mitra Indonesia pada tahun 2026 ditetapkan sebesar USD 35 miliar, yang dihitung berdasarkan rata-rata realisasi investasi lima tahun terakhir menggunakan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selanjutnya, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) efektivitas kerja sama ekonomi internasional diperoleh dari akumulasi bobot capaian 3 komponen yang telah ditetapkan.

$$Tingkat\ Efektivitas\ Kerja\ Sama\ Ekonomi\ Internasional = 80\% \times \frac{(Realisasi\ \sum Komitmen\ KSEB+KSER+KSEM)}{(Target\ \sum komitmen\ KSEB+KSER+KSEM)} + 10\% \times \frac{(Realisasi\ \sum Nilai\ Perdagangan\ KSEB+KSER+KSEM)}{(Target\ \sum Nilai\ Perdagangan\ KSEB+KSER+KSEM)} + 10\% \times \frac{(Realisasi\ \sum Nilai\ Investasi\ KSEB+KSER+KSEM)}{(Target\ \sum Nilai\ Investasi\ KSEB+KSER+KSEM)}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 85% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif serta pada dokumen Perencanaan Kinerja Deputy Tahun 2026. Adapun target triwulan I sebesar 12,5%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Nilai Realisasi Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 33,23% atau mencapai 39% dari target Tahun 2026 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi	Persen	12,5%	33,23	266%

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi terdiri jumlah komitmen kerja sama ekonomi internasional dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 80%, nilai perdagangan dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%, dan nilai investasi dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

1.	Melaksanakan komitmen kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral periode Triwulan I: - RI-Inggris Economic Growth Partnership Agreement - Implementasi Kesepakatan RI-IPEF (Agreed Minutes Supply Chain LRAB Meeting) - HLTF-EI ke-49 - Implementasi JCM melalui <i>Global Partnership Meeting</i> (GPM)	Terlaksana	• Menko Perekonomian dan Secretary of State for Business and Trade Kerajaan Inggris menandatangani kerja sama <i>Economic Growth Partnership (EGP)</i> di London pada 19 Januari 2026. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral Indonesia – Inggris dan mendukung implemetasi <i>Accord for a New Indonesia – United Kingdom Strategic Partnership</i> yang diluncurkan pada kedua kepala pemerintahan pada tanggal 20 Januari 2026 di London • Rapat persiapan substansi pertemuan HLTF-EI ke49 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026 secara hybrid • Pertemuan HLTF-EI ke-49 telah dilaksanakan pada tanggal 25-27 Februari 2026 di Iloilo City, Filipina • Penyusunan rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN telah dilaksanakan pada 27 Februari 2026 yang merupakan <i>outcome</i> dari pertemuan HLTF-EI ke-49 • Delegasi Kemenko Perekonomian telah menghadiri JCM Global Partnership Meeting (GPM) yang berlangsung pada tanggal 2-5
----	--	------------	---

			Februari 2026 di Tokyo, Jepang sebagai pertemuan tahunan yang diikuti oleh negara mitra JCM untuk membahas implementasi JCM • Tindak lanjut dari pertemuan GPM adalah koordinasi lintas kementerian sektor untuk mempercepat implementasi MRA, melanjutkan diskusi <i>forestry guidelines</i> dengan pihak Jepang dan Kementerian Kehutanan, dan perlu penyesuaian <i>initial report</i> pasca Perpres 110/2025
2.	Menganalisa potensi ekspor melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral pada triwulan I	Terlaksana	Analisis potensi ekspor dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra, yaitu Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Rusia, dan Belarus. Kegiatan dilakukan secara berkelanjutan melalui <i>desk analysis</i>, pemantauan dan perkembangan perdagangan, identifikasi komoditas unggulan ekspor, serta evaluasi peluang peningkatan akses pasar dan kerja sama perdagangan termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan mengenai data yang diperlukan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan dukung dan

			masukkan isu strategis dalam pelaksanaan berbagai pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra.
3.	Menganalisa potensi investasi dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral pada triwulan I	Terlaksana	Analisis potensi investasi dengan negara mitra melalui pengumpulan data dan informasi investasi serta perkembangan kerja sama bilateral. Koordinasi dengan BKPM untuk memperoleh data dan masukkan terkait tren investasi dan sektor potensial.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menandatangani Perjanjian ART pada tanggal 19 februari 2026 yang menetapkan kesepakatan besaran tarif resiprokal dan pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan indonesia
2. Rapat Koordinasi Tindakanjutan Perjanjian Perdagangan Resiprokal pada tanggal 24 Februari 2026.
3. Partisipasi dalam penyelenggaraan pertemuan ke-7 working Group on Trade Investment and Industry (WGTII) RI-Rusia yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 April 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yakni adanya keterbatasan anggaran, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada Triwulan I sehingga menyebabkan sejumlah pertemuan dengan negara mitra harus diselenggarakan secara virtual dan hybrid, ataupun partisipasi aktif dalam sebuah forum harus dilaksanakan secara virtual.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Optimalisasi pelaksanaan pertemuan secara hybrid dengan negara mitra, termasuk pemanfaatan fasilitas ruang kantor yang tersedia, serta menjajaki dukungan sponsor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.
2. Fokus pada kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis.

Persentase
Penyelesaian
Kesepakatan pada
Perjanjian Indonesia-

Latar Belakang

European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)

Penyelesaian isu strategis perjanjian Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) sebagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi yang bertujuan menghapus tarif impor secara luas untuk produk Indonesia ke Eropa dan membuka pasar Eropa serta membuka akses investasi bagi Eropa ke Indonesia. Perjanjian ini ditangani oleh beberapa Kementerian dengan koordinasi utamanya oleh Kemenko Perekonomian. Perjanjian ini penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan European Union (EU) sebagai mitra utama Indonesia yang menghasilkan komitmen konkret untuk mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dalam mendorong hasil nyata berupa penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian Indonesia – European Union CEPA.

Target IKU ini adalah terealisasinya 5 (lima) upaya penyelesaian isu strategis pada kesepakatan perjanjian Indonesia – EU CEPA 2026, yaitu:

1. Pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis dalam Legal Scrubbing IEU-CEPA
2. Penyelesaian Rakor antar K/L pembahasan penyelesaian isu strategis dalam proses legal scrubbing perjanjian IEU-CEPA
3. Penyelenggaraan bilateral meeting dengan Uni Eropa
4. Penyelenggaraan rapat koordinasi antar K/L pembahasan persiapan finalisasi penandatanganan perjanjian IEU-CEPA
5. Penyelenggaraan dukungan substansi dan logistik pada hari penandatanganan perjanjian IEU-CEPA

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026. Adapun hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)	Persen	10%	20%	200%

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I dan tercapai melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga terkait melalui rapat koordinasi serta pelaksanaan kinerja triwulan I yang baik. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Persiapan dan Perencanaan Timeline Penyelesaian IEU-CEPA	Terlaksana	Telah dilakukan pengumpulan dilakuan untuk proses <i>legal scrubbing</i> yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan selaku <i>Chief Negotiator</i> IEU-CEPA dan Ketua Pelaksana

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya dilakukan dengan melakukan pertemuan secara virtual, pertemuan di dalam kantor, serta pelaksanaan kegiatan dengan anggaran Kedubes EU.

Latar Belakang

Penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia – Amerika Serikat merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi, yang bertujuan meningkatkan impor secara luas untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat dan membuka pasar Amerika Serikat, serta membuka akses investasi bagi Amerika Serikat ke Indonesia. Perjanjian ini ditangani oleh beberapa Kementerian dengan koordinasi utamanya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perjanjian ini penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, menyinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan Amerika Serikat sebagai mitra utama Indonesia yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi. IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

*Persentase
Penyelesaian
Kesepakatan pada
Perjanjian
Perdagangan
Resiprokal
Indonesia-Amerika
Serikat*

dalam mendorong hasil nyata berupa penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia- Amerika Serikat.

Taregt IKU ini adalah terealisasinya 8 (delapan) paya penyelesaian isu strategis pada kesepakatan perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia – Amerka Serikat tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penyelesaian isu strategis pada *intersessional meeting* perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) secara virtual;
2. Penyelesaian isu strategis pada perundingan ke-6 perjanjian perdagangan resiprokal in person di Washington DC;
3. Penyelesaian isu strategis an sensitif pada *Ministrial Meeting*;
4. Penyelesaian isu strategis pada pelaksanaan Indonesia – United States Leaders and Business Summit 2026;
5. Penyelesaian isu strategis dalam dokumen perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) Indonesia – AS;
6. Penyelesaian isu strategis pada *Consultation of Section 301 Investigation of the Trade Act O 1974*;
7. Penyelesaian isu strategis pada penyusunan amandemen perjanjian perdagangan resiprokal (ART) Indonesia – AS;
8. Penyelesaian isu strategis tindak lanjut amandemen perjanjian perdagnagan resiprokal (ART) Indonesia – AS.

Hasil Pengukuran Kinerja

Penyelesaian isu strategis pada kesepakatan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat	Persen	50%	62,5%	125%

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja TW 1 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, maka diprediksi realisasi dan capaian kinerja pada TW 2 dan selanjutnya di 2026 khususnya pada IKU Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – AS diproyeksikan akan berjalan dengan baik.

Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui rakor, serta pelaksanaan kinerja TW 1 yang baik. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.3 Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat			
1	Penyelesaian Substansi Kesepakatan ART (<i>Agreement Reciprocal Trade</i>)	Terlaksana	Diselenggarakan Pertemuan Intersesi dengan USTR membahas Teks ART RI-AS terkait Services and Investment dan Customs Trade Facility pada tanggal 8-9 Januari 2026
2	Penyelesaian Substansi Kesepakatan CSC (<i>Country Specific Comitment</i>)	Terlaksana	Telah dilaksanakan pertemuan pembahasan Legal Scrubing Teks Perjanjian ART RI-AS antara Pemri dengan USTR pada tanggal 13-14 Februari 2026 secara virtual dalam rangka penyelesaian seluruh isu dalam dokumen perjanjian ART RI-AS.
3	Penyelesaian Substansi Kesepakatan <i>Joint Statement</i> Penandatanganan dokumen kerja sama B2B pada Indonesia-US <i>Business Summit</i>	Terlaksana	Telah dilaksnaakan pertemuan antara Menko Perekonomian dengan Deputy USTR pada tanggal 20 Januari 2026 untuk membahas pending issues yang sensitif dalam perundingan ART RI-AS

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menandatangani Perjanjian ART pada tanggal 19 februari 2026 yang menetapkan kesepakatan besaran tarif resiprokal dan pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan indonesia

2. Rapat Koordinasi Tindaklanjut Perjanjian Perdagangan Resiprokal pada tanggal 24 Februari 2026.
3. Partisipasi dalam penyelenggaraan pertemuan ke-7 working Group on Trade Investment and Industry (WGTII) RI-Rusia yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 April 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yakni adanya keterbatasan anggaran, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada Triwulan I sehingga menyebabkan sejumlah pertemuan dengan negara mitra harus diselenggarakan secara virtual dan hybrid, ataupun partisipasi aktif dalam sebuah forum harus dilaksanakan secara virtual.

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah:

1. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang meliputi:

- Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral
 - Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
2. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang meliputi:
 - Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA
 - Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
 3. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang meliputi:
 - Rekomendasi kebijakan proses penyusunan Initial Memorandum yang mencakup penyusunan narasi posisi Indonesia atas instrumen OECD, harmonisasi substansi pada komite, dan tindak lanjut hasil reviu Sekretariat Tim Nasional OECD
 - Rekomendasi kebijakan yang mencakup perumusan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis global, konsolidasi substansi lintas K/L, dan tindak lanjut atas hasil pertemuan pada forum Sherpa Track G20.
 4. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Investasi dan Hilirisasi yang meliputi rekomendasi kebijakan kemudahan berinvestasi dan akselerasi hilirisasi.
 5. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang meliputi:
 - Pelaporan secara berkala terkait Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)
 - Perkembangan ekonomi global dan domestik
 - Prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal bussiness yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4 penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Dokumen Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2026. Adapun target triwulan I sebesar 1 dari 4.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 1 dari 4 atau mencapai 100% dari target Triwulan I-2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	1 dari 4	1 dari 4	100%

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terdiri dari nilai efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan seluruh Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, sebagai berikut:

$$\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{25 \times 20 \times 10 \times 20 \times 25} = 19,03$$

Nilai efektivitas 24,8 masuk dalam kategori 1 dari 4, di mana nilainya masih di bawah dari 70. Hal tersebut dikarenakan realisasi nilai efektivitas tersebut bersifat proses dan akumulasi dari triwulan I-IV.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Indeks efektivitas meliputi penyelesaian komitmen, partisipasi dalam forum, dan implementasi kebijakan kerja sama ekonomi dengan negara mitra Indonesia. Tiga tahap proses yang telah tercapai sebagai berikut identifikasi isu kerja sama ekonomi, koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dan pelaku usaha, serta formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Melakukan identifikasi kendala dalam penguatan dan/atau perluasan kerja sama ekonomi dan investasi	Terlaksana	Penyusunan kuesioner survei serta penyebaran tautan survei kepada counterpart K/L, Kedubes dan mitra terkait lainnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya

5

Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Sasaran program ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan

Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep}}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen perencanaan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Adapun target triwulan I sebesar 3 dari 4.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 3,63 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	100 %

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terdiri dari rata-rata hasil survei seluruh Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Pada triwulan I telah disusun form survei dan dilaksanakan koordinasi dengan seluruh Asisten Deputy untuk penyelenggaraan survei yang akan dilaksanakan pada triwulan II.

Berdasarkan capaian di atas serta kegiatan yang telah dilaksanakan, proyeksi capaian indeks kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, koordinasi dan pengendalian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi pada triwulan I tahun 2026 diperkirakan akan berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, tersusunnya form survei dan data responden.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pengukuran Hasil Survei kepuasan kualitas layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei kepuasan layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah penyiapan dan reviu form survey yang disebarluaskan kepada Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait serta pendataan responden.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- Terselesaikannya form survey melalui Google Form.
- Terselesaikannya data responden.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya dan efisiensi penggunaan anggaran diantaranya Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dilakukan secara online melalui Google Form dan penyampaian juga dilakukan melalui whatsapp sehingga tidak memerlukan penggunaan kertas maupun biaya lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yakni semakin sedikit responden yang berkenan melakukan pengisian survei dengan alasan sudah pernah mengisi sebelumnya.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan lebih banyak pendataan responden.
2. Melakukan penyebaran link survey secara aktif pada berbagai kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

6

Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen perencanaan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2026. Adapun target triwulan I sebesar 25%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, [Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi](#) yang telah terealisasi sebesar 22,92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	25%	22,92%	92%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian, Rencana Aksi dan Manual IKU Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat penyusunan penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual IKU tahun 2026 baik secara internal di lingkungan Kedeputian 2 maupun pembahasan bersama dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU tahun 2026 telah ditetapkan pada Januari 2026
2	Penyusunan Renja 2027	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengisian matriks usulan Renja 2027.
3	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan

			tim kerja di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi No 1 Tahun 2026.
4	Penyusunan laporan Kinerja Triwulan I	Terlaksana	Telah selesai dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulan I.
5	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk pemrosesan surat dan disposisi secara rutin selama triwulan I.
6	Monev Realisasi Anggaran Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan secara rutin pengisian laporan capaian anggaran melalui E-Monev di Triwulan I.
7	Penyusunan RPD Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2026 melalui kegiatan pengisian matrik RPD dari Biro MKKS.
8	Pencatatan Rencana Pengadaan pada SIRUP	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Januari 2026 melalui Aplikasi LPSE.
9	Monev Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja BKN Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakannya penyusunan SKP Target pegawai pada triwulan I tahun 2026.
10	Pemetaan Rencanan Aksi RB Tematik 2026	Terlaksana	Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2026 masih menunggu arahan lebih lanjut dalam penyusunan rencana aksi berdasarkan catatan dan rekomendasi dari KemenPAN-RB dan sesuai manual IKU dijadwalkan selesai pada Tw III tahun 2026.
11	Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan	Terlaksana	Terlaksana pada Apel pagi tanggal 9 Februari 2026 serta Dialog Kinerja tanggal 31 Maret 2026.

12	Dukungan Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAKHLAK	Terlaksana	Terlaksana publikasi konten dan penggunaan logo berAKHLAK pada bahan paparan dan sertifikat pelatihan.
----	---	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja dengan meningkatkan monitoring ketercapaian target dari masing-masing komponen reformasi birokrasi dan realisasi anggaran di unit Eselon II.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Dialog Kinerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
- b. Terlaksananya persuratan dan disposisi Pimpinan melalui Srikandi.
- c. Terlaksananya pelaporan dan monitoring capaian kinerja dan anggaran melalui ekon-Go.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya seleksi kegiatan dan jumlah pegawai yang ditugaskan dengan mempertimbangkan urgensi kegiatan, beban kerja dan kebutuhan anggaran. Selain itu, dilakukan juga optimalisasi penggunaan media digital dalam penyelenggaraan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih diprioritaskan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat kebijakan refocusing anggara yang menyebabkan beberapa kegiatan harus ditunda atau batal dilaksanakan.
2. Terdapat permasalahan teknis pada sistem Srikandi yang menyebabkan tidak dapat diakses dan digunakan untuk proses persuratan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan penyesuaian timeline kegiatan dan program kerja.
2. Menggunakan alternatif media digital melalui optimalisasi penggunaan Google Mail, Google Spreadsheet, dan Google Drive untuk administrasi perusratan dan disposisi.

Jakarta, 10 April 2026

Deputi Bidang Koordinasi Kerja
Sama Ekonomi dan Investasi

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'EP' followed by a long horizontal stroke.

Edi Prio Pambudi